

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS UNTUK PEMULIHAN EKONOMI

Oleh:

Ginandjar Kartasasmita
Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri

**Disampaikan pada Sarasehan Dalam Rangka HUT ke-30 FKP DPR-RI
Jakarta, 12 Februari 1998**

Ekonomi kita dewasa ini sedang menghadapi tantangan berat yang memerlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya. Saya diminta untuk mengantar pada diskusi Saudara-saudara. Karena itu, yang akan saya sampaikan hanyalah kerangka saja untuk pembahasan lebih lanjut.

Perkembangan ekonomi dunia pada umumnya, dan krisis ekonomi di Thailand pada khususnya telah memicu perubahan persepsi 'pasar' terhadap situasi ekonomi negara-negara di kawasan kita yang selama ini mengalami pertumbuhan pesat, termasuk Indonesia. Gejala regional itu, telah membuat pelaku pasar menilai bahwa masalah-masalah yang sedang kita hadapi di Indonesia seperti kredit macet pada perbankan yang cukup besar, dan hutang swasta luar negeri yang meningkat dengan cepat menjadi cukup serius sehingga terjadilah krisis ekonomi seperti yang kita hadapi hingga kini. Krisis moneter tersebut menyebabkan Rupiah terdepresiasi lebih dari 75 persen, paling besar dibandingkan dengan dampaknya pada negara-negara sekawasan lainnya. Negara-negara lain tingkat depresiasinya adalah antara 13–48 persen.

Krisis ini mempunyai ramifikasi yang sangat luas. Perusahaan-perusahaan swasta (termasuk yang bergerak di sektor keuangan) yang mempunyai hutang luar negeri dan tidak mengasuransikannya (*hedge*) mengalami kesulitan melunasi pokok dan bunga hutangnya. Akibat lanjutannya adalah makin meningkat lagi kredit macet di sektor perbankan. Keadaan ini telah menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat domestik maupun internasional akan prospek perekonomian kita. Bahkan *Letter of Credit* (L/C) yang dikeluarkan oleh bank nasional tidak diterima oleh eksportir asing, sehingga menimbulkan hambatan terhadap impor, termasuk bahan baku dan bahan kebutuhan pokok, yang sangat diperlukan oleh perekonomian kita.

Akibatnya, harga bahan baku dan barang antara (*intermediate goods*), terutama yang diimpor, meningkat. Kenaikan tersebut pada akhirnya harus diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga barang yang jadi lebih tinggi. Bahkan pada bulan Januari 1998 lalu, inflasi mencapai sekitar 7 persen. Inflasi dalam tahun anggaran 1997/98 sampai dengan Januari telah mencapai 16 persen.

Kita telah merasakan bahwa harga kebutuhan bahan-bahan pokok telah meningkat dengan pesat. Disamping kebutuhan pokok, penyediaan obat-obatan yang hampir 90 persen bahan bakunya diimpor serta berbagai bahan medis penting juga mengalami goncangan. Persediaan obat-obatan, peralatan keluarga berencana, serta kebutuhan bahan medis di rumah sakit dan PUSKESMAS menjadi sangat terbatas.

Juga telah terjadi krisis pada sektor peternakan, yang membuat produksi ayam potong dan produksi telur berkurang, disebabkan mahalnya harga makanan ayam yang kebanyakan masih diimpor.

Walaupun inflasi kini sudah pada tingkat tinggi, kita menyadari bahwa proses penyesuaian harga-harga masih belum selesai. Proses penyesuaian harga ini dapat berakibat penurunan produksi yang dapat menyebabkan pengangguran meningkat. Kedua masalah ini, inflasi dan pengangguran, dapat menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Akibatnya dapat menjadi kerawanan sosial dan ancaman bagi stabilitas politik.

Keadaan bisa lebih buruk apabila nilai tukar rupiah tidak segera menguat kembali. Memang tidak akan kembali seperti semula, yaitu sekitar Rp 2.500 per dolar AS, karena dalam tingkat itu Rupiah kita *overvalued*, tetapi di atas Rp. 5.000/6.000, sesungguhnya Rupiah kita menurut perkiraan sudah *undervalued*. Jika keadaan seperti sekarang ini berlangsung berkepanjangan, perekonomian kita akan mengalami pertumbuhan negatif dengan inflasi yang sangat tinggi, suatu keadaan yang tidak pernah kita alami selama Orde Baru.

Selain krisis ekonomi, kita juga mengalami kekeringan yang disebabkan oleh gejala alam yang mempengaruhi kawasan Asia. Musim kekeringan berkepanjangan berdampak langsung terhadap produksi pertanian, di samping mengakibatkan kebakaran hutan di beberapa daerah. Memasuki tahun 1998, keterlambatan musim tanam dan panen tidak dapat mendorong sektor pertanian untuk segera kembali pulih. Selain itu, ternyata gejala El Nino masih mempengaruhi iklim kita, sehingga musim hujan sekarang ini tidak berlangsung seperti biasanya. Sekarang terasa kurangnya curah hujan di beberapa tempat di Indonesia. Bahkan di Kalimantan Timur, curah hujan sangat sedikit sehingga kebakaran hutan harus selalu diwaspadai.

Sektor pertanian yang diharapkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi pada saat yang sulit ini tidak dapat tumbuh secepat yang diharapkan. Ketersediaan komoditi pangan berkurang, dan akhirnya berpengaruh pada laju inflasi. Biasanya sektor konstruksi di perkotaan dapat menyerap tenaga kerja yang berasal dari perdesaan dalam musim kemarau. Namun krisis ekonomi yang berdampak pada sektor konstruksi berdampak pada penurunan tenaga kerja musiman yang bisa diserap.

Untuk menanggulangi berbagai dampak yang sangat merugikan ini, telah diupayakan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat mendesak (*crash program*). Untuk menjaga stabilitas harga pangan, kita mengimpor beras dan berbagai bahan pangan seperti terigu, gula dan kedelai. Demikian pula bahan untuk obat-obatan. Selain ketersediaan, harga sementara masih harus disubsidi. Selain itu, akan diupayakan untuk bisa memperoleh peningkatan produksi pangan dengan menekan kehilangan hasil panen, serta meningkatkan intensifikasi dan pemanfaatan lahan-lahan 'tidur' (tidak produktif).

Melalui program padat karya diupayakan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. Kegiatan *crash program* ini diarahkan kepada pekerja musiman dan yang berketerampilan rendah di daerah perkotaan dan perdesaan, untuk rehabilitasi atau pembangunan jalan desa, saluran irigasi, penghijauan dan penghutanan kembali, dan usaha-usaha produktif lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Dalam penyusunan anggaran tahun mendatang, upaya penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan tetap dilanjutkan dan diprioritaskan. Anggaran rupiah yang didaerahkan mencapai dua per tiga dari seluruh tabungan pemerintah. Dengan alokasi ini diharapkan daerah dapat memelihara momentum pembangunan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, diarahkan agar pelaksanaannya secara maksimal dengan padat karya. Proyek-proyek sektoral juga diarahkan untuk sejauh mungkin menciptakan lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya. Bahkan proyek-proyek bantuan luar negeri diupayakan untuk dilakukan dengan padat karya. Dengan Bank Dunia hal ini telah dibicarakan dan disetujui.

Upaya penciptaan lapangan kerja juga terus dilanjutkan dengan pengembangan agroindustri dan produksi pangan, yang relatif padat-karya dan tidak begitu terpengaruh oleh persoalan kurs Rupiah. Selain itu, dikembangkan pula kegiatan untuk menampung tenaga kerja yang berketerampilan, dengan titik berat pada pengembangan wirausaha, karena perusahaan-perusahaan diperkirakan belum bisa segera memperluas kesempatan kerja, bahkan mungkin juga belum dapat menampung kembali tenaga kerja sebanyak yang di-PHK.

Selain upaya-upaya yang bersifat jangka pendek (*crash program*) untuk mengurangi dampak krisis ekonomi ini, telah dilakukan pula upaya-upaya yang bersifat jangka menengah dan panjang. Pada tataran makro langkah-langkah untuk mengatasi gejolak nilai tukar Rupiah telah diambil sejak awal. Misalnya, penjadwalan kembali proyek-proyek dan revisi anggaran pembangunan.

Juga telah disusun program reformasi dan restrukturisasi ekonomi dan keuangan yang menyeluruh dan mencakup berbagai bidang. Program-program itu meliputi bidang moneter, perbankan, fiskal, perdagangan dalam dan luar negeri, investasi dan privatisasi BUMN. Sejak diumumkannya program reformasi ini oleh Bapak Presiden pertengahan bulan Januari 1998 yang lalu telah banyak yang dilaksanakan dengan dikeluarkannya berbagai peraturan yang bertujuan menyetatkan sistem perbankan kita dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah pembentukan Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, penyelesaian hutang luarnegeri swasta; pemberian jaminan atas deposito masyarakat dan pinjaman perbankan; merger Bank BUMN dan penetapan batas minimal modal bank swasta; penghapusan pembatasan tata niaga berbagai komoditi; dan berbagai langkah lain yang bertujuan melancarkan perdagangan dan akhirnya menggerakkan perekonomian kita.

Dalam rangka menstabilkan nilai tukar rupiah, dewasa ini kita secara serius sedang mengkaji *currency board system*. Tentu ada saja yang menunjukkan kelemahan maupun risikonya. Namun, kekuatan dan keuntungannya pun tidak kecil. Salah satu yang terpenting adalah dengan menerapkan sistem ini nilai tukar rupiah diharapkan dapat segera kembali pada tingkat yang akan menyetatkan kembali perekonomian nasional.

Proses penyesuaian kembali perekonomian kita diperkirakan masih akan berlangsung dalam dua atau tiga tahun ke depan.

Dalam proses penyesuaian ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi masih akan relatif rendah. Salah satu penyebab dari pertumbuhan yang rendah tersebut adalah ketersediaan modal, karena para investor, baik dari dalam maupun utamanya dari luar negeri, masih akan sangat berhati-hati sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dilihat dari sisi penawaran, beberapa kegiatan di sektor pertanian dan industri memang dapat menguat kembali dalam waktu yang relatif lebih cepat. Hal ini didorong oleh nilai tukar valuta asing dewasa ini, sehingga sektor-sektor tersebut menjadi lebih kompetitif. Namun sektor jasa, khususnya *property*, akan mengalami kesulitan yang lebih lama.

Namun, saya yakin setelah lewat masa transisi 2-3 tahun itu, ekonomi kita akan pulih kembali.

Setelah masa transisi itu kita lewati, inflasi dan suku bunga akan turun kembali, dan potensi pertumbuhan akan meningkat lagi. Pertumbuhan investasi dan ekspor akan meningkat, bahkan dengan lebih kukuh. Kesempatan kerja akan terbuka kembali. Daya beli masyarakatpun akan menguat. Sementara itu, proses penyesuaian produksi diharapkan sudah selesai sehingga mesin perekonomian siap untuk *“take off”* kembali menjelang pertengahan Repelita VII dan ketahanan ekonomi sudah akan sangat mantap memasuki Repelita VIII.

Dengan demikian, persoalan kita sekarang adalah yang berjangka pendek. Bagaimana kita bisa melewati masa transisi satu dan dua tahun ke depan ini dengan baik dan selamat. Setelah itu, Insya Allah, kita akan makin kuat, bahkan mungkin lebih kuat daripada sebelumnya.

Demikianlah uraian saya mengenai krisis ekonomi dan prospek pemulihannya. Kondisi saat ini memang merupakan cobaan yang sangat berat bagi bangsa Indonesia. Namun di lain pihak kita bisa melihatnya sebagai rahmat. Karena dengan depresiasi Rupiah yang wajar dan program reformasi ekonomi itu, perekonomian Indonesia akan menjadi lebih kokoh dan kompetitif dalam era global memasuki abad ke-21.